

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan keuangan sekolah yang transparan merupakan kunci utama untuk menjaga integritas, efisiensi, dan keberlanjutan sistem pendidikan. Namun, sayangnya, masih terdapat banyak kasus di mana kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana BOS yang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Berbagai penyimpangan dana BOS yang terjadi antara lain, seperti dilaporkan Sukoco & Bilal Ramadhan (2025, 6 Juni) melaporkan bahwa Kejari Sita Uang Rp 3,1 Miliar Kasus Korupsi Dana BOS SMK PGRI 2 Ponorogo, 3 Tersangka Segera Disidang. Saripuddin (2025, 12 Juni) Kejari Jeneponto Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Dana BOS. Tim Regional (2024, 30 Juli) Polisi Tetapkan Satu Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOS SMP di Trenggalek, Rugikan Negara Rp 514 Juta. Penemuan lainnya dilaporkan oleh Aris Rivaldo (2023, 26 Januari) bahwa Kejaksaan Negeri Pandeglang mengungkap kerugian negara terkait korupsi dana BOS Afirmasi tahun anggaran 2019 mencapai sekitar Rp 1,6 miliar. Sementara itu, laporan Wisma Putra (2022, 21 Okt) melaporkan bahwa empat orang ditangkap Kejati Jabar dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional (BOS) senilai Rp 22 miliar.

Berdasarkan temuan kasus di atas, pengelolaan dana BOS ataupun pembiayaan Pendidikan lainnya membutuhkan sebuah sistem yang tidak hanya memudahkan pengguna tetapi juga memuat adanya sistem pengawasan yang mumpuni.

Penyimpangan dalam pengelolaan BOS di sekolah dapat berupa penyalahgunaan dana, manipulasi laporan keuangan, nepotisme dalam penggunaan sumber daya, serta ketidakadilan dalam distribusi dana. Semua ini dapat merugikan siswa, guru, dan masyarakat yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam penelitiannya (Ekowati, 2015; Zainudin, 2019) menyatakan bahwa penyalahgunaan dana BOS dapat terjadi karena kurangnya transparansi pihak sekolah terhadap publik. Pihak sekolah berkewajiban memberikan hak

kepada orang tua siswa untuk dapat mengakses Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), termasuk informasi publik yang dimaksudkan agar masyarakat dapat ikut andil dalam pengawasan aliran dana BOS, tetapi masih banyak sekolah yang tidak memberikan akses tersebut sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui aliran dana BOS tersebut.

Menurut Amin et al. (2022) kurangnya transparansi ada beberapa faktor antara lain: kurangnya pemahaman akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan sekolah, keterbatasan pengawasan dan kontrol dari pihak terkait seperti orangtua murid, dewan guru, dan pemerintah daerah serta kurangnya media publikasi. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kurang transparan di sekolah tidak hanya menjadi masalah internal, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat, khususnya pada kualitas pendidikan dan keadilan dalam sistem pendidikan. Menurut Qasanah, U. K. (2023), Transparansi merupakan kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Ketika proses pengelolaan dana BOS dilakukan tanpa transparansi, hal ini dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga pendidikan tersebut. Kepercayaan yang rusak dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan secara keseluruhan, karena masyarakat menjadi skeptis terhadap tujuan dan manfaat yang dihasilkan dari penggunaan dana pendidikan. Dalam penelitiannya Hamdanah, E. (2023) mengemukakan bahwa kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana BOS sering kali mengakibatkan penggunaan dana pendidikan yang tidak optimal. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti pengadaan buku pelajaran, perbaikan infrastruktur sekolah, atau pelatihan guru, dapat disalahgunakan atau diarahkan untuk kepentingan yang tidak terkait dengan pendidikan. Akibatnya, kualitas pendidikan di sekolah tersebut menjadi terhambat dan siswa tidak mendapatkan manfaat maksimal dari dana yang seharusnya disediakan untuk mereka.

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan BOS di sekolah merupakan masalah serius yang perlu segera diatasi. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen dana BOS, kita dapat memastikan bahwa sumber daya pendidikan digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas

pendidikan dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua siswa. Hanya dengan kerjasama antara semua pihak terkait, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang transparan, inklusif, dan berkualitas. Hal ini harus diupayakan agar menjadi budaya sekolah yang positif. Terkait budaya pengelolaan keuangan sekolah Brimley et al. (2020) menyatakan bahwa budaya pengelolaan keuangan sekolah mencakup norma-norma dan nilai-nilai yang memandu cara dana sekolah dikelola, dipertanggungjawabkan, dan digunakan, merupakan fondasi yang tak tergantikan dalam memastikan sumber daya pendidikan digunakan dengan bijak. Ardani & Trihantoyo (2020) berpendapat bahwa pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat keberlanjutan pendidikan. Sedangkan (Riadi, 2021; Amin et al., 2022; Sine et al., 2022; Nurdiani, 2018) menyebutkan pentingnya budaya pengelolaan keuangan sekolah seperti transparansi, akuntabilitas dan efisiensi. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk memiliki budaya pengelolaan keuangan yang baik dan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan.

Transparansi dapat ditingkatkan dengan pengendalian internal, menurut Sari et al. (2020) bahwa kontrol internal memiliki dampak signifikan pada transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola laporan keuangan. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu dalam mengelola keuangan seperti pencegahan kecurangan dan penyalahgunaan, pemantauan pengeluaran dan pendapatan, kepatuhan terhadap aturan dan regulasi serta meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat. Hidayat et al. (2021) berpendapat bahwa bimbingan teknis, pendampingan, dan pengawasan memainkan peran penting dalam peningkatan ketelitian dan ketepatan pengelolaan dana di sekolah. Dengan hal tersebut dapat meningkatkan kompetensi, memastikan terhadap kepatuhan aturan dan pencegahan penyalahgunaan dana, maka hal ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien dalam pengelolaan sumber daya Pendidikan. Pakasi (2022) menegaskan bahwa pendampingan pengelolaan keuangan dapat meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan sekolah. Senada hal tersebut, Layuk & Sesa (2019), menyatakan bahwa pendampingan selama proses pengelolaan keuangan sekolah dapat meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas publik.

Upaya pemerintah dalam melakukan perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan sekolah, salah satunya dana BOS, yaitu dengan memanfaatkan penggunaan teknologi melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) sejak tahun 2021. ARKAS dijadikan sebagai bentuk transformasi digital dengan harapan pengelolaan dana BOS pada satuan pendidikan akan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan sesuai prinsip pengelolaan keuangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Berdasarkan laporan resmi dari situs Kemdikbud, <https://bos.kemdikbud.go.id/> yang terlihat dalam Tabel 1.1, disajikan data perbandingan pelaporas BOS sebelum dan sesudah menggunakan ARKAS dengan data sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perbandingan Pelaporan BOS Sebelum Menggunakan ARKAS dan Sesudah menggunakan ARKAS

Laporan Triwulan IV Tahun 2018 (sebelum menggunakan ARKAS)				Laporan Tahap 2 Tahun 2022 (sesudah menggunakan ARKAS)		
Jenjang	Total Salur	Sudah Lapor	Belum Lapor	Total Salur	Sudah Lapor	Belum Lapor
SD	73.842	10.063 (13.63%)	63.779 (86.37%)	146.680	146.445 (99.84%)	235 (0.16%)
SLB	1.266	149 (11.77%)	1.117 (88.23%)	2.185	2.176 (99.59%)	9 (0.41%)
SMA	5.752	704 (12.24%)	5.048 (87.76%)	13.470	13.407 (99.53%)	63 (0.47%)
SMK	8.225	1.569 (19.08%)	6.656 (80.92%)	13.932	13.804 (99.08%)	128 (0.92%)
SMP	19.980	3.023 (15.13%)	16.957 (84.87%)	40.340	40.219 (99.70%)	121 (0.30%)
Total	109.06	15.508 (14.22%)	93.557 (85.78%)	216.61	216.051 (99.74%)	556 (0.26%)

Sumber : <https://bos.kemdikbud.go.id/>

Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti pada Tabel 1.1 diatas, tampak bahwa terdapat perubahan yang signifikan dalam pelaporan dana BOS sebelum menggunakan ARKAS dengan sesudah menggunakannya. Sebelum menggunakan ARKAS, laporan Triwulan IV pada tahun 2018 tercatat 15.508 (14.22%) yang sudah laporan pada akhir periode, sementara laporan tahap 2 (akhir periode) tahun

2022 yaitu 216.051 sekolah (99.74%) yang sudah laporan. Sementara itu, hasil observasi yang dilakukan berkaitan dengan pelaporan dana BOS di Kabupaten Majalengka setelah menggunakan aplikasi ARKAS juga mengalami perbedaan yang signifikan. Dimana, saat sebelum menggunakan aplikasi yaitu sebelum tahun 2022, laporan dana BOS bisa diselesaikan 3 atau 4 bulan setelah akhir tahun yaitu bulan Maret atau April. Setelah menggunakan aplikasi ARKAS, yaitu pada tahun 2022, laporan dana BOS dapat diselesaikan di bulan Januari. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi ARKAS sangat membantu dalam pengelolaan dana BOS secara efektif dan efisien.

Dalam implementasi penggunaan ARKAS di Kabupaten Majalengka, saat ini seluruh sekolah telah menggunakan aplikasi tersebut sejak tahun 2022, pada tahap perencanaan dan pelaporan berjalan efektif dan efisien, namun dalam prinsip transparan dan akuntabilitas masih rendah, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan ARKAS saat ini hanya sebatas memindahkan pencatatan dari manual ke digital yang dilakukan oleh operator atau bendahara sekolah. Pihak terkait lainnya seperti guru, pengawas dan komite sekolah masih rendah tingkat partisipasinya dalam pengelolaan keuangan BOS.

Meskipun implementasi aplikasi ARKAS dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah membawa kemajuan dalam aspek administratif, berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, menemukan sejumlah permasalahan yang signifikan dalam praktik di lapangan. Salah satu persoalan utama adalah masih rendahnya transparansi dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Meskipun perencanaan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dalam praktiknya, guru dan komite sekolah belum sepenuhnya dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan dan evaluasi penggunaan dana. Informasi yang diberikan cenderung bersifat umum, tanpa rincian anggaran yang memadai, sehingga menimbulkan kesenjangan informasi antar pihak yang seharusnya berperan dalam pengawasan.

Pada aspek perencanaan anggaran, keterlibatan stakeholder seperti pengawas, guru, dan komite sekolah dalam penyusunan RKAS seringkali masih bersifat

formalitas. Sekolah belum sepenuhnya melibatkan seluruh pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan, sehingga potensi aspirasi dan kebutuhan riil di sekolah tidak seluruhnya terakomodasi.

Dalam pelaksanaan anggaran, penyampaian informasi mengenai realisasi kegiatan dan penggunaan dana sering kali belum merata dan belum terstruktur. Informasi realisasi anggaran yang seharusnya dapat diakses bersama kerap kali hanya dibahas dalam lingkup terbatas, atau disampaikan secara pasif, sehingga menimbulkan jarak antara pengelola dan warga sekolah.

Permasalahan juga muncul pada pelaporan dan pertanggungjawaban. Laporan keuangan, baik yang disusun melalui ARKAS maupun dokumen pendukung seperti kwitansi dan rekap realisasi, seringkali hanya dipublikasikan secara terbatas, misalnya melalui papan pengumuman yang kurang strategis atau tidak diperbarui secara berkala. Akibatnya, akses publik terhadap informasi pertanggungjawaban dana BOS masih kurang optimal.

Pada aspek informasi publik, belum semua sekolah memanfaatkan media terbuka secara maksimal. Informasi anggaran yang tersedia melalui papan pengumuman, media sosial, atau website sekolah belum selalu disajikan secara lengkap dan mudah dipahami oleh seluruh warga sekolah maupun masyarakat luas.

Di sisi lain, koordinasi antar unsur pelaksana juga belum optimal. Pembagian tugas yang terlalu sektoral menyebabkan minimnya interaksi dan sinergi antara kepala sekolah, bendahara, operator, guru, dan komite. Kondisi ini mengakibatkan lemahnya kontrol internal dan berpotensi menimbulkan kesalahan atau penyimpangan dalam realisasi anggaran. Masalah teknis dalam penggunaan ARKAS juga menjadi perhatian, seperti kesalahan dalam klasifikasi belanja dan penginputan kode rekening yang tidak sesuai, yang pada akhirnya memerlukan revisi laporan dan memperlambat proses pelaporan keuangan.

Selain itu, belum adanya sistem pengawasan internal di tingkat sekolah menjadi kelemahan tersendiri. Pengawasan selama ini sepenuhnya bergantung pada monitoring dari Dinas Pendidikan dan audit tahunan oleh Inspektorat, tanpa adanya tim evaluasi internal yang dapat meninjau laporan secara mandiri sebelum diajukan. Di tengah tuntutan transparansi publik, sekolah juga belum memanfaatkan media

digital secara optimal sebagai sarana penyampaian informasi keuangan. Penyampaian laporan BOS masih terbatas pada papan pengumuman di sekolah dan belum dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Berdasarkan beberapa penelitian yang relevan, pengelolaan dana BOS di beberapa sekolah cenderung didominasi oleh kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah, sementara keterlibatan pihak-pihak lain seperti guru, komite sekolah, dan pengawas masih sangat terbatas, khususnya pada tahap pelaksanaan dan evaluasi. Penelitian yang dilakukan oleh Mariana (2022) mengungkapkan bahwa pengawasan dana BOS di MA Al-Falah Tapung Makmur Kampar masih terpusat pada kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah. Meskipun komite sekolah terlibat dalam beberapa tahapan, pengawasan mereka lebih bersifat pasif dan terbatas hanya pada rapat dan publikasi penggunaan dana BOS, tanpa terlibat langsung dalam penyusunan rencana dan evaluasi keuangan.

Hal yang serupa juga ditemukan dalam penelitian Sukamulia (2022), yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS di SD Negeri 1 Sukamulia Kabupaten Lombok Timur didominasi oleh kepala sekolah, bendahara, dan guru. Komite sekolah dan orang tua siswa belum terlibat secara maksimal dalam proses perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), yang merupakan langkah awal yang sangat penting dalam penggunaan dana BOS. Keterlibatan terbatas ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pengawasan, yang seharusnya melibatkan lebih banyak pihak untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, penelitian oleh Fatimah et al. (2024) pada SD Negeri 19 Kampung Olo menunjukkan bahwa meskipun aplikasi ARKAS digunakan untuk mempermudah pelaporan dan pengelolaan dana BOS, keterlibatan masyarakat, termasuk orang tua dan komite sekolah, dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana BOS masih minim. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi dapat membantu dalam proses administrasi, keterlibatan lebih banyak pihak dalam pengawasan masih diperlukan untuk mencapai transparansi yang lebih baik.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Winedhar et al. (2024) di SD

Negeri Delik 01 Tuntang Kabupaten Semarang juga menemukan bahwa pengelolaan dana BOS lebih dikuasai oleh kepala sekolah dan bendahara, dengan keterlibatan komite sekolah yang terbatas hanya pada tahap perencanaan. Pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah dan pihak lain di luar manajemen sekolah belum cukup intensif, yang dapat mempengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS.

Permasalahan-permasalahan ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem pengelolaan berbasis digital seperti ARKAS telah diterapkan, tantangan pada aspek teknis, koordinatif, dan partisipatif masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pengelolaan dana BOS yang benar-benar transparan dan akuntabel. Padahal prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan sekolah sangatlah penting dan menjadi faktor penentu. Menurut Trisnawati (2019) tercapainya pengelolaan anggaran pendidikan yang baik, organisasi sektor publik sangat membutuhkan adanya akuntabilitas terutama di bidang pendidikan. Sementara itu, Lailia (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan kebijakan dalam pengelolaan keuangan sekolah yang harus diterapkan setiap sekolah. Akuntabilitas dan transparansi sangat penting karena dengan penerapan prinsip tersebut sekolah dapat dipercaya serta dapat meningkatkan partisipasi komponen sekolah. Untuk mencapai tujuan sekolah, maka diperlukan upaya yang lebih dari sekolah salah satunya adalah dengan pengelolaan dana BOS yang baik dan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dana BOS. Perubahan budaya pengelolaan keuangan sekolah perlu ditingkatkan agar transparansi dan akuntabilitas meningkat.

Merujuk pada pemaparan penelitian terdahulu terkait variabel pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel, ditemukan adanya research gap pada penelitian satu dengan penelitian lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Ar Rahmah (2023) bahwa penggunaan aplikasi ARKAS pada pelaporan dana BOS memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan di sekolah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2023), bahwa transparansi pengelolaan dana BOS melalui penggunaan aplikasi ARKAS di sekolah dapat tercipta dengan baik jika ditunjang dengan adanya

manajemen keuangan yang memperhatikan adanya mekanisme pengelolaan berdasarkan kebijakan sekolah. Sementara itu, Rudolf (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan keuangan BOS dengan ARKAS pada indikator perencanaan, implementasi dan akuntabilitas berjalan dengan efektif, namun indikator transparansi tidak disebutkan.

Berdasarkan fenomena, permasalahan dan penelitian terdahulu yang relevan, model transparansi pada pengelolaan keuangan di sekolah relatif masih perlu adanya pengembangan. Pengembangan model transparansi berfokus pada kesiapan sumber daya manusia dan kebijakan yang diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan di sekolah berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Maka dari itu dengan memperhatikan uraian di atas, penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengembangan Model Transparansi (SISTA BOS) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Sekolah di Kabupaten Majalengka”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah bahwa pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat satuan pendidikan dasar masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang menghambat terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan secara optimal.

Masalah-masalah tersebut tidak semata-mata terletak pada aspek teknis penganggaran atau pelaporan administratif, melainkan lebih dalam, yaitu pada lemahnya sistem tata kelola yang partisipatif dan kurangnya mekanisme kontrol internal yang berjalan secara berkelanjutan.

Mengacu pada berbagai persoalan di atas, peneliti melihat perlunya intervensi model sistemik yang tidak hanya memperbaiki instrumen dan prosedur, tetapi juga membangun ekosistem pengelolaan BOS yang berbasis pada pendampingan, literasi keuangan, dan budaya transparansi.

Oleh karena itu, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pengelolaan keuangan BOS dengan menggunakan ARKAS untuk jenjang SMP di Kabupaten Majalengka ?
 - a. Bagaimana proses penyusunan perencanaan keuangan BOS ?
 - b. Seperti apa pelaksanaan keuangan BOS ?
 - c. Bagaimana sekolah membuat pelaporan keuangan BOS ?
 - d. Bagaimana pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ?
2. Bagaimana gambaran kompetensi pengelola dana BOS dengan ARKAS untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas ?
 - a. Bagaimana pemahaman dan kemampuan operasional pengelola BOS dalam menggunakan ARKAS ?
 - b. Bagaimana kemampuan pengelola BOS dalam menghasilkan laporan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas ?
 - c. Bagaimana tingkat pemahaman pengelola dana BOS terhadap peraturan dan regulasi terkait pengelolaan dana BOS?
3. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS menggunakan ARKAS di jenjang SMP?
4. Bagaimana model transparansi untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS dengan menggunakan pendekatan 4D (define, design, develop, disseminate) ?

Dengan perumusan masalah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan sebuah model yang tidak hanya valid secara konseptual, tetapi juga efektif secara praktis dalam membangun sistem tata kelola keuangan sekolah yang lebih transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh rumusan dari pengembangan model transparansi (SISTA BOS) dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan sekolah. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Tergambarkannya pengelolaan keuangan BOS dengan menggunakan ARKAS untuk jenjang SMP di Kabupaten Majalengka.

- a. Untuk memperoleh informasi mengenai proses penyusunan perencanaan keuangan BOS.
 - b. Untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan keuangan BOS.
 - c. Untuk memperoleh informasi mengenai sekolah membuat pelaporan keuangan BOS.
 - d. Untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.
2. Tergambarkannya kompetensi pengelola dana BOS dengan ARKAS untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas.
 - a. Untuk mengetahui pemahaman dan kemampuan operasional pengelola BOS dalam menggunakan ARKAS.
 - b. Untuk memahami kemampuan pengelola BOS dalam menghasilkan laporan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.
 - c. Untuk mengetahui tingkat pemahaman pengelola dana BOS terhadap peraturan dan regulasi terkait pengelolaan dana BOS.
 3. Teranalisisnya faktor-faktor yang memengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS menggunakan ARKAS di jenjang SMP.
 4. Terumuskannya desain model transparansi untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS dengan menggunakan pendekatan 4D (define, design, develop, disseminate).

1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna baik dalam ranah pengembangan ilmu pengetahuan (manfaat teoritis), maupun dalam praktik pengelolaan keuangan pendidikan di jenjang SMP dan pemerintah daerah (manfaat praktis). Adapun manfaat tersebut dirinci sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi pendidikan dan tata kelola keuangan publik di sektor pendidikan dasar. Melalui pendekatan Research and Development (R&D) dengan model 4D (Define, Design, Develop, Disseminate),

penelitian ini memperkuat basis teoretik mengenai:

- a. Konsep transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah dalam perspektif sistem pengelolaan berbasis partisipasi;
- b. Model pendampingan internal sebagai pendekatan alternatif dalam mendorong efektivitas tata kelola dana BOS di sekolah;
- c. Penguatan literatur tentang pengembangan model pendidikan, khususnya pada konteks pengelolaan keuangan berbasis sistem dan indikator keberhasilan terukur.

Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi konseptual maupun metodologis dalam penelitian lanjutan yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pendidikan dasar dan literasi keuangan publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan langsung bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOS dan pengawasan pendidikan, antara lain:

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini menjadi sarana pengembangan wawasan dan keterampilan akademik dalam mengkaji, merancang, dan mengimplementasikan model tata kelola yang solutif berbasis kebutuhan lapangan serta berorientasi pada perubahan sistemik.
- b. Bagi Sekolah (Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, Operator), model SISTA BOS yang dikembangkan memberikan panduan praktis dalam menyusun perencanaan anggaran, melaksanakan kegiatan, menyusun laporan keuangan berbasis bukti, dan melakukan refleksi melalui evaluasi bersama. Dengan model ini, sekolah dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan integritas dalam pengelolaan dana pendidikan.
- c. Bagi Pengawas Sekolah dan Dinas Pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menyusun sistem monitoring dan evaluasi yang lebih partisipatif dan kontekstual, serta membantu memastikan kesesuaian pelaksanaan BOS dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi.
- d. Bagi Pemerintah Daerah dan Pembuat Kebijakan, model ini dapat diadopsi

sebagai salah satu rujukan dalam merumuskan regulasi, kebijakan pembinaan, dan pengawasan tata kelola keuangan pendidikan yang lebih adaptif dan berbasis pembelajaran kolaboratif.

- e. Bagi Komite Sekolah dan Masyarakat, penelitian ini memberikan ruang dan mekanisme untuk berpartisipasi secara bermakna dalam pengawasan sosial terhadap dana publik, serta memperkuat kepercayaan terhadap institusi pendidikan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan solusi teknis atas permasalahan transparansi, tetapi juga mendorong transformasi budaya organisasi sekolah menuju tata kelola yang lebih akuntabel dan demokratis.

1.5 Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menyadari adanya sejumlah keterbatasan yang dapat memengaruhi generalisasi dan ruang lingkup pemanfaatan model yang dikembangkan. Adapun keterbatasan tersebut meliputi:

- a. Penelitian ini hanya dilakukan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga hasil temuan dan pengembangan model belum dapat digeneralisasi secara langsung untuk jenjang pendidikan lainnya seperti SD atau SMA/SMK yang memiliki karakteristik pengelolaan dana, struktur organisasi, dan kapasitas SDM yang berbeda.
- b. Model diuji secara terbatas hanya di dua sekolah pada satu kabupaten, yaitu di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Kondisi geografis, tata kelola birokrasi, dan budaya organisasi sekolah di daerah lain tentu dapat memengaruhi efektivitas penerapan model, sehingga diperlukan adaptasi kontekstual jika ingin direplikasi.
- c. Pengujian model dilakukan dalam waktu yang relatif terbatas dan belum mencakup satu siklus penuh tahunan Dana BOS. Beberapa perubahan perilaku organisasi atau dampak jangka panjang terhadap transparansi dan akuntabilitas memerlukan waktu lebih lama untuk dapat diamati secara komprehensif.
- d. Walaupun model SISTA BOS mengedepankan prinsip partisipatif, dalam

pelaksanaan di lapangan keterlibatan pihak luar seperti masyarakat umum, LSM pendidikan, atau media lokal masih belum maksimal. Hal ini membatasi aspek transparansi publik secara lebih luas.

- e. Meskipun model mencantumkan instrumen digital (seperti pelaporan melalui ARKAS), penelitian ini tidak secara khusus mengembangkan atau mengevaluasi sistem digital pendukung transparansi seperti dashboard keuangan online atau aplikasi pelacakan anggaran real-time, yang potensial memperluas jangkauan dan efisiensi

1.6 Novelty Penelitian

Pendampingan BOS selama ini menempatkan pengawas sekolah sebagai aktor utama yang dominan di tahap perencanaan, sementara pelaksanaan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi relatif minim supervisi. Akibatnya, monitoring internal lemah, partisipasi stakeholder terbatas, dan transparansi cenderung administratif, bukan akuntabilitas publik.

Kebaruan yang ditawarkan SISTA BOS, bahwa penelitian ini memperkenalkan arsitektur pendampingan multi aktor yang membagi peran ke tiga tim, yaitu (1) Pengawas Sekolah, pendampingan perencanaan & evaluasi; (2) Tim Audit Internal BOS, pendampingan pelaksanaan & monitoring; (3) Tim Verifikasi dan Validasi (VerVal) BOS, pendampingan pelaporan. Desain ini mengawal seluruh siklus BOS (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi) dengan SOP & instrumen terstandar yang divalidasi oleh ahli.

Kebaruan akademik, model memadukan teori good governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi), partisipasi publik, dan internal control ke dalam kerangka R&D dengan model pengembangan 4D, menghasilkan design principles pendampingan keuangan sekolah yang dapat direplikasi.

Kebaruan praktis, bahwa produk operasional berupa SOP, form supervisi, checklist Monev, panduan komunikasi publik (infografis/website), serta mekanisme koordinasi lintas tim yang belum menjadi praktik baku dalam pengelolaan BOS. Fokusnya bukan menambah aplikasi, melainkan mereposisi peran manusia & proses agar transparansi terukur dan dapat diaudit.

1.7 Struktur Organisasi Disertasi

Disertasi ini disusun secara sistematis dalam lima bab utama yang menggambarkan keseluruhan proses penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga rekomendasi model yang dihasilkan. Adapun struktur organisasi disertasi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keterbatasan penelitian, serta sistematika penulisan disertasi. Pada bagian latar belakang disampaikan fenomena aktual terkait praktik pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang masih menghadapi tantangan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menjadi dasar untuk mengembangkan model sistem transparansi berbasis pendampingan (SISTA BOS). Penjelasan juga diberikan mengenai pentingnya inovasi model sebagai respon terhadap lemahnya pelibatan stakeholder dan mekanisme kontrol internal sekolah.

Bab II Kajian Pustaka, menyajikan landasan teoretis dari berbagai disiplin ilmu yang relevan, termasuk teori manajemen pendidikan, akuntabilitas publik, transparansi keuangan, dan model pengembangan sistem. Selain itu, dipaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menjadi rujukan, disertai dengan identifikasi theoretical gap, empirical gap, dan research gap yang memperkuat argumentasi akademik dan urgensi pengembangan model. Berdasarkan kajian tersebut, dikembangkan kerangka konseptual dan model teoritik awal sebagai pijakan untuk menyusun desain model yang akan diuji.

Bab III Metodologi Penelitian, menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan, yaitu Research and Development (R&D) dengan model pengembangan 4D (Define, Design, Develop, Disseminate). Disampaikan secara rinci prosedur penelitian pada setiap tahap 4D, termasuk teknik pengumpulan data seperti kajian dokumen, wawancara, observasi, FGD, validasi ahli, serta uji coba terbatas. Dalam bab ini juga dijelaskan unit analisis, lokasi penelitian, informan kunci, serta prosedur validasi instrumen yang digunakan dalam pengembangan dan pengujian model.

Bab IV Hasil Penelitian, menyajikan hasil penelitian secara bertahap sesuai dengan pendekatan 4D. Dimulai dari hasil identifikasi masalah dan kebutuhan

(Define), perancangan model dan instrumen (Design), proses pengembangan, validasi, dan uji coba model (Develop), hingga strategi penyebaran model (Disseminate).

BAB V Pembahasan, Pada bagian ini dilakukan pembahasan mendalam atas temuan-temuan penelitian, dikaitkan dengan teori-teori yang telah dikaji. Evaluasi terhadap efektivitas dan kelayakan model juga disampaikan, beserta keterbatasan penelitian baik dari segi ruang lingkup, metodologi, maupun waktu pelaksanaan.

Bab VI Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang mengacu pada tujuan dan pertanyaan penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan sintesis temuan dari setiap tahap pengembangan model. Selain itu, bab ini juga mengemukakan implikasi teoretis dan praktis dari penerapan Model SISTA BOS dalam konteks pengelolaan keuangan sekolah, serta rekomendasi bagi pengembangan kebijakan, praktik lapangan, dan arah penelitian lanjutan.